

Tata Kelola Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

Governance for the Distribution of Family Hope Program Assistance in Malimbong Village, Messawa District, Mamasa Regency, West Sulawesi Province

Verni Stefiana^{*}, Udin B. Sore, Nurkaidah

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
email: stefianaverni@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2022 / Disetujui : 30 Januari 2022

Abstrak

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Malimbong, Kecamatan Messawa, penelitian fokus kepada pengelolaan bantuan PKH dan distribusi dana PKH ini oleh Pemerintah. Metode dari penelitian yang di jalankan ini adalah deskriptif kualitatif tujuannya menemukan gambaran dengan jelas atas pengelolaan yang dijalankan menyangkut bagaimana pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini sendiri. Adapun teknik dari pengumpulan data digunakan teknik wawancara, kemudian observasi, dan terakhir dokumentasi. Dari sumber penelitian yang ada ditemukan bahwa program ini masih belum berjalan sesuai dengan dengan pedoman PKH. Hal ini dapat di lihat dari Standar Operasional Prosedur dalam buku pedoman pelaksanaan PKH, PKH ini memiliki 4 tahap inti dari awal hingga akhir yaitu validasi, penyaluran bantuan, pertemuan kelompok, dan verifikasi. Dari keempat tahapan di atas ada 2 tahapan yakni validasi dan pertemuan kelompok yang belum maksimal di lakukan oleh pemerintah Desa Malimbong Kecamatan Messawa. Pada tahapan distribusi atau penyaluran bantuan PKH di Desa Malimbong Kecamatan Messawa, tidak berjalan dengan efektif, di samping pendataan calon peserta PKH (calon penerima bantuan PKH) yang belum di maksimalkan, juga waktu penyaluran bantuan tidak sesuai dengan waktu yang di telah di tentukan dalam buku pedoman PKH 2021 yaitu 4 kali dalam 1 tahun.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pendistribusian, Pemerintah, Program Keluarga Harapan

Abstract

Implementation of the Family Hope Program in Malimbong Village, Messawa District, the research focuses on the management of PKH assistance and the distribution of PKH funds by the Government. control, information and communication, and monitoring activities. The method of the research conducted is descriptive qualitative with the aim of getting a clear picture of the management carried out regarding the implementation of the Family Hope Program (PKH). observation, and documentation. From the results of existing research, it is known that so far the implementation of this program has not run in accordance with the PKH guidelines. , group meetings, and verification. Of the four stages above there are 2 stages, namely validation and group meetings that have not been maximally carried out by the Malimbong Village government, Messawa District. At the distribution or distribution stage of PKH assistance in Malimbong Village, Messawa District, it did not run effectively, In addition to collecting data on prospective PKH participants (prospective PKH aid recipients) that have not been maximized, the time for distributing aid is not in accordance with the time specified in the 2021 PKH guidebook, which is 4 times in 1 year.

Keywords: Management, Distribution, Government, Family Hope Program



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia sudah menerapkan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang kemudian disebut Program Keluarga Harapan (PKH). PKH berbeda dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya ketika pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini lebih merupakan upaya untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kesejahteraan sosial mereka dan untuk memutus mata rantai kemiskinan yang telah terjalin selama ini. PKH termasuk dalam klaster 1 Pro-Poor (berpijak untuk menanggulangi kemiskinan) yaitu program bantuan dan perlindungan sosial di Indonesia berdasarkan pengentasan kemiskinan. Seperti namanya, ini adalah program bantuan tunai bersyarat pendidikan dan kesehatan dengan. Landasan hukum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Sebagai bagian dari bantuan PKH, Kabupaten Mamasa merupakan salah satu daerah yang telah menerima bantuan. Sebagai kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Barat, kabupaten ini termasuk dalam kategori tertinggal. Kabupaten paling utara Sulawesi Barat ini merupakan daerah pegunungan dengan akses jalan dan transportasi yang terbatas. Dengan demikian hal ini berpengaruh pada keterbatasan akses pengetahuan dan kurangnya kemampuan untuk melaksanakan program-program pemerintah. Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami permasalahan umum khusus Desa Malimbong, Kecamatan Messawa di Kabupaten Mamasa semuanya terkena dampak karena kurangnya sosialisasi dan perhatian pemerintah terhadap bantuan PKH, sebagian masyarakat memanfaatkan bantuan tersebut seiring dengan adanya wabah Virus Corona atau yang kita kenal dengan (Covid 19) saat ini tak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga kehidupan sehari-hari. Seperti terbatasnya aktivitas di luar rumah, ekonomi yang mulai menurun. Sehingga membuat keluarga yang tergolong miskin sulit untuk mencari pekerjaan dan hanya bergantung pada bantuan pemerintah baik dari pusat maupun daerah. Hal inilah yang menjadi suatu tantangan dalam pendistribusian bantuan PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Maka dari itu peneliti mengambil judul tentang "Tata Kelola Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Malimbong, Kecamatan Messawa"

PKH merupakan program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditujukan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memberikan bantuan sosial bagi keluarga miskin dan rentan (KPM). PKH merupakan upaya negara untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Secara internasional perlindungan sosial ini dikenal sebagai *Conditional Cash Transfer (CCT)*. PKH telah membantu mengurangi kemiskinan dan menumbuhkan kemandirian penerima bantuan sosial sejak diluncurkan pada tahun 2007. Yang kemudian disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Landasan Hukum Program Keluarga Harapan tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Sasaran PKH yaitu keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). KPM PKH ditentukan berdasarkan keluarga yang mempunyai komponen pendidikan, kesehatan dan/atau kesejahteraan sosial.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan dan mengetahui keadaan nyata yang hendak di nilai dan dapat memudahkan peneliti mendapat data objektif dari pengelolaan bantuan PKH di Desa Malimbong Kecamatan Messawa. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwasanya metode penelitian

kualitatif itu di gunakan dalam meneliti keadaan objek alamiah dan instrumen dimana kuncinya adalah peneliti itu sendiri, triangulasi atau gabungan di jadikan tehnik pengumpulan data, kemudian hasil dalam penelitian lebih menekankan pada arti generalisasi. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas (Sugiyono, 2013)

Moleong (2006) menjelaskan bahwa fokus penelitian adalah acuan dalam pengambilan data informasi pada permasalahan penelitian dengan cara konsisten pada tujuan dan masalah, sehingga menjadi pedoman dalam memaparkan temuan di lapangan. Karenanya penelitian ini akan mengarah pada Tata Kelola Penyaluran Bantuan PKH di Desa Malimbong.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bagian dari bantuan PKH, Kabupaten Mamasa merupakan salah satu daerah yang telah menerima bantuan. Sebagai kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Barat, kabupaten ini termasuk dalam kategori tertinggal. Kabupaten paling utara Sulawesi Barat ini merupakan daerah pegunungan dengan akses jalan dan transportasi yang terbatas. Dengan demikian hal ini berpengaruh pada keterbatasan akses pengetahuan dan kurangnya kemampuan untuk melaksanakan program-program pemerintah. Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami permasalahan umum khusus Desa Malimbong, Kecamatan Messawa di Kabupaten Mamasa semuanya terkena dampak karena kurangnya sosialisasi dan perhatian pemerintah terhadap bantuan PKH, sebagian masyarakat memanfaatkan bantuan tersebut

Governance seringkali diartikan sebagai pengaturan. Sementara dalam konteks GCG, governance dikenal sebagai tata kelola perusahaan. Sebagaimana didefinisikan dalam Turnbull Report (Muh Arief Effendi, 2009), tata kelola (*governance*) ialah Sistem pengendalian internal perusahaan yang mempunyai tujuan pokok dalam pengelolaan risiko yang substansial untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan mengamankan aset perusahaan dan membangun nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Pengendalian internal (*control*) ialah mekanisme yang digunakan untuk membantu perlindungan dari risiko atau mengurangi dampak risiko jika terjadi dalam perusahaan.

Menurut Communittee Of Sponsoring Organization Of The Threadway Commission (COSO) Pengendalian internal mengacu pada serangkaian aktivitas yang mencakup setiap aspek organisasi. Pengendalian internal mengacu pada struktur organisasi dan semua proses serta tindakan yang ada untuk melindungi aset organisasi dari semua sudut. Aktivitas bisnis menggunakan pengendalian internal untuk melindungi aset mereka dan memastikan data akuntansi mereka akurat dan dapat diandalkan, mengembangkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang ditetapkan.

Communittee Of Sponsoring Organization Of The Threadway Commission (COSO) menyebutkan pengendalian internal dikalsifikasikan menjadi komponen-komponen sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian (controlenvironment)

Sikap manajemen dan karyawan terhadap pengendalian dalam organisasi membentuk apa yang dikenal sebagai lingkungan pengendalian dalam perusahaan. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian termasuk jenis organisasi (manajemen tunggal dalam persekutuan atau manajemen tunggal dalam perseroan) dan jenis gaya manajemen, serta struktur organisasi dan praktik personalia. Lingkungan pengendalian ini merupakan aspek penting yang menjaditumpuan untuk efektivitas tindakan pengendalian internal lainnya. Komponen ini mencakup sikap manajemen pada semua tingkatan pada

umumnya, serta konsep pengendalian pada khususnya. Komponen tersebut mencakup etika, kompetensi dan integritas, serta kepentingan terhadap kesejahteraan sosial.

2. Penilaian Risiko (RiskAssesment)

Penting bagi manajemen perusahaan untuk dapat mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dihadapi perusahaan. Untuk meminimalkan risiko, dimungkinkan untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko yang telah diidentifikasi sehingga dapat ditentukan terkait perkiraan Intensitas dan langkah-langkah untuk mengurangnya.

3. Prosedur Pengendalian

Ada beragam cara manajemen perusahaan memberlakukan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. Kegiatan ini dikenal sebagai prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian meliputi:

- (1) personel yang kompeten;
- (2) pendelegasian tanggung jawab;
- (3) penguraian tanggung jawab untuk kegiatan terkait; dan
- (4) pemisahan aspek keuangan, penyimpanan aset, dan operasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Komponen ini mengandung unsur-unsur penting informasi yang dapat berkaitan dengan tindakan mengendalikannya, menilai resiko, prosedur pengendalian dan monitoring pengendalian internal perusahaan. Informasi ini diperlukan oleh manajemen sebagai sarana untuk menetapkan pedoman operasional dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pelaporan yang berlaku di perusahaan.

5. Pemantauan (monitoring)

Efektivitas pengendalian dapat ditingkatkan dengan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Dengan bantuan penilaian khusus atau upaya manajemen, pengendalian internal dapat dipantau dengan cara yang tepat. Sebagai langkah terakhir dalam proses pemantauan, hal ini dapat dilaksanakan dengan mengamati perilaku karyawan atau mencari tanda peringatan dari sistem akuntansi.

Proses distribusi ialah menyampaikan produk dari produsen yang membuatnya ke konsumen yang membutuhkannya, dalam buku Pengantar Ekonomi Makro (2004) oleh perusahaan T. Gilarso, SJ. Distribusi merupakan bagian penting dari keseluruhan proses ekonomi yang biasa disebut dengan pemasaran saat ini. Aspek penting yang tidak boleh dilupakan ialah pemilihan saluran distribusi yang tepat guna memberi kelancaran arus barang atau jasa dari produsen dan konsumen (*channel of distribution*).

Adapun yang menjadi tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

- (1) menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
- (2) meningkatkan laju sampai hasil produksi ketangan konsumen.
- (3) terwujudnya produksi yang merata.
- (4) peningkatan kualitas dan kuantitas produksi.
- (5) menciptakan keseimbangan produksi.
- (6) peningkatan manfaat dari barang dan jasa.

Sementara itu, fungsi dari distribusi diklasifikasikan menjadi dua yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan. Berikut indikator yang dapat digunakan menurut Kotler (2007) untuk pengukuran distribusi:

1. Sistem Transportasi: berhubungan dengan kegiatan mengirim dan menyalurkan barang
2. Ketersediaan Produk: berkaitan dengan produk yang ada dalam perusahaan untuk konsumen
3. Waktu penantian: durasi yang dibutuhkan untuk menunggu produk yang diharapkan konsumen

Sistem distribusi ialah metode dimana barang dan jasa dari produsen ke konsumen didistribusikan atau digunakan. Sistem saluran distribusi dimaksudkan agar produksi sampai ke tangan konsumen dengan lancar namun perlu pula diperhatikan kondisi produsen dan masyarakat yang memiliki sistem saluran pasokan yang baik, dimana kegiatan produksi dan konsumsi sangat digalakkan. Ketika produsen mendistribusikan hasil produksinya kepada konsumen.

Mengenai pengelolaan PKH mulai dari penyusunan rencana kerja dan segala kegiatan yang mengikuti Buku Pedoman PKH. Dalam pelaksanaan PKH sendiri ada 4 tahap inti yaitu validasi kemudian penyaluran bantuan berupa dana tunai, verifikasi dan pertemuan kelompok. Kemudian untuk tugas masing coordinator dan pendamping yang menjadi point penting adalah tercantum dalam buku pedoman PKH bahwa setiap pertemuan kelompok, pendamping atau koordinator memiliki tugas untuk memberikan informasi kepada peserta PKH namun hal ini belum terlaksana dengan baik karena adanya wabah covid – 19 ruang gerak pemerintah menjadi sempit.

Adapun pendistribusian bantuan program keluarga harapan di Desa Malimbong Kecamatan Messawa masih belum terlaksana dengan baik karena dalam pendistribusiannya masih terdapat kekurangan mengenai sasaran penerima bantuan tidak akurat di karenakan tidak adanya pemutakhiran data yang di lakukan setiap 3 bulan sekali. Selain itu waktu penyaluran belum efisien karena penyaluran bantuan berjalan tidak sesuai waktu yang di tentukan dalam buku pedoman PKH yaitu setiap 4 kali dalam satu tahun hal ini di keranakan adanya wabah covid – 19.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah belum maksimal dalam memenuhi 4 tahap inti dari Program Keluarga Harapan, yaitu validasi dan pertemuan kelompok. Dalam pendistribusian dana PKH pemerintah kurang memberikan informasi mengenai kapan penyaluran dana bantuan. Mengenai informasi dan pengarahan yang di berikan pihak pelaksana PKH yang kemudian terkendala dengan terbatasnya ruang gerak untuk pertemuan dengan peserta akibat adanya pandemi covid – 19 selama 2 tahun terakhir, seharusnya memanfaatkan media elektronik atau daring untuk memberikan informasi kepada peserta PKH. Mengenai distribusi bantuan PKH yang terkendala waktu penyalurannya, seharusnya pemerintah Kecamatan atau Desa memberikan arahan bagi masyarakat mengenai kendala – kendala yang di alami sehingga waktu distribusi dana menjadi lambat agar tidak timbul pertanyaan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Nuraini, I. (2016). *Pengantar Ekonomi Mikro*. UMM Press.
- Purba, Y. F. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor. Universitas Sumatera Utara Medan
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 3(3).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).
- http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13031/1/1506016005_Wawan%20Sulistiyono_full%20skripsi%20-%20wawan%20sulistiyono.pdf (Di akses pada 4 September 2021)
- <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> (Di akses pada 4 September 2021)

<https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-1-2018-program-keluarga-harapan>
(Diakses pada 4 September 2021)

<http://digilib.uinsby.ac.id/1694/5/Bab%202.pdf> (Di akses pada 7 September 2021)